

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti merujuk penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang selanjutnya akan diungkapkan persamaan serta perbedaannya yang mendukung penelitian ini.

2.1.1 Hikmah Is'ada Rahmawati (2013)

Hikmah Is'ada Rahmawati (2013) meneliti tentang “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan”. Variabel yang digunakan yaitu manajemen laba yang diukur dengan menggunakan proksi *discretionary accruals*, dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan manajerial sebagai variabel bebas (independen).

Penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011, dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang periode laporannya berakhir pada 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2011. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang mencakup laporan keuangan, yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba dan data *corporate governance* untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme *good corporate governance* melalui *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

Hasil penelitian ini adalah mekanisme *good corporate governance* yang digunakan yaitu dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti mendapatkan adanya persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu variabel yang sama, teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*, serta Uji Asumsi Klasik yang sama. Ada juga perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu periode penelitian sampel pada periode 2011-2013 yang terdapat di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tetapi untuk penelitian terdahulu pada periode 2009-2011 yang terdapat pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.1.2 Maya Indriastuti (2012)

Maya Indriastuti (2012) meneliti tentang “Analisis Kualitas Auditor Dan Corporate Governanace Terhadap Manajemen Laba”. Variabel yang digunakan yaitu manajemen laba sebagai variabel terikat, dan karakteristik perusahaan yang mencakup kualitas auditor, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen sebagai variabel bebas (independen). Penelitian ini mengambil populasi seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2011. Penentuan sampel perusahaan dilakukan dengan metode “*purposive sampling*”.

Data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan perbankan tahun 2009-2011 yang diperoleh dari www.idx.co.id. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba adalah kualitas auditor, sedangkan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan. Variabel proporsi dewan komisaris independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif pada pendapatan dari perbankan manajemen perusahaan.

Dari penelitian diatas, peneliti mendapatkan adanya persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu variabel dependen yang sama yaitu Manajemen Laba. Dan ada juga perbedaan yang ada pada

penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu variabel dan periode penelitian sampel untuk penelitian sekarang menggunakan variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, Kepemilikan Manajerial pada periode 2011-2013 yang terdapat di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tetapi untuk penelitian terdahulu variabel yang digunakan yaitu variabel Kualitas Auditor, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen pada periode 2009-2011 yang terdapat pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.1.3 Ratnaningsih SY dan Cholis Hidayati' (2012)

Ratnaningsih SY dan Cholis Hidayati (2012) meneliti tentang “Pengaruh Corporate Governanace Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Manajemen laba merupakan masalah keagenan yang seringkali dipicu oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan sebagai variabel terikat, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit sebagai variabel bebas (independen).

Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan dilakukan dari tahun 2009-2011. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian dipilih

dengan menggunakan metode *purposive sampling* serta ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 perusahaan.

Hasil penelitian ini yaitu hanya variabel kepemilikan komite audit yang mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Deddy (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa keberadaan komite audit dapat menghambat terjadinya manajemen laba, sedangkan proporsi dewan independen dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti mendapatkan adanya persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu menggunakan variabel yang sama yaitu Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial. Ada juga perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu periode penelitian sampel untuk penelitian sekarang pada periode 2011-2013 yang terdapat di perusahaan perbankan tetapi untuk penelitian terdahulu pada periode 2009-2011 yang terdapat pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.1.4 Welvin I Guna Dan Arleen Herawaty (2010)

Welvin I Guna dan Arleen Herawaty meneliti tentang “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas

Audit dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba” variabel yang digunakan untuk penelitian ini Manajemen Laba sebagai variabel terikat, Kepeilikan Instiusional, Kepemilikan Manajemen, Komite Audit, Komisaris Independen, Independensi Auditor, *Leverage*, Kualitas Auditor, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel bebas (independen).

Populasi yang digunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selama periode 2006-2008. Pemiihan sampel menggunakan *purposive sampling*, yang dipilih berdasarkan kriteria perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia minimal sejak Desember 2005-2008. Jumlah sampel perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel adalah 40 perusahaan dengan 120 data penelitian. Setelah uji *outlier* jumlah data yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 106 data penelitian.

Hasil penelitian dari variabel Kepeilikan Instiusional, Kepemilikan Manajemen, Komite Audit, Komisaris Independen, Independensi Auditor, *Leverage*, Kualitas Auditor, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terdapat pengaruh pada Manajemen Laba.

Dari penelitian di atas, peneliti mendapatkan adanya persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu menggunakan pemilihan sampel yang sama yaitu *purposive sampling*. Dan ada juga perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu variabel dan periode penelitian sampel untuk penelitian sekarang

menggunakan variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, Kepemilikan Manajerial pada periode 2011-2013 yang terdapat di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tetapi untuk penelitian terdahulu variabel yang digunakan yaitu variabel Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen, Komite Audit, Komisaris Independen, Independensi Auditor, *Leverage*, Kualitas Auditor, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan pada periode 2006-2008 yang terdapat pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu *good corporate governance*. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan agen. J & M (1976), Watts & Z (1986) dalam laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan (Vinola Herawaty, 2008). Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggung jawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada agen (Vinola Herawaty, 2008).

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*). (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Hikmah Is'ada Rahmawati (2013) menyebutkan bahwa manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) atau yang disebut dengan *agency conflict*. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik, namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*.

Audit berfungsi sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian didalam penyajian informasi keuangan. (Dwi Suci Angelia, 2012). Audit juga merupakan satu proses yang digunakan untuk mengurangi terjadinya ketidakselarasan informasi antara *principal* dan *agent* dengan cara menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Sehingga hasil audit yang berkualitas akan dapat membantu pihak eskternal dalam mendeteksi terjadinya praktik manajemen laba.

Teori agensi mengasumsikan bahwa CEO (agen) memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal. Hal ini dikarenakan prinsipal tidak dapat mengamati kegiatan yang dilakukan agen secara terus-menerus dan berkala. Karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen, maka prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi inilah yang disebut asimetri informasi. Konflik inilah yang kemudian dapat memicu biaya agensi (Maya Indriastuti, 2012).

Aplikasi teori agensi dalam sektor perbankan menjadi unik karena sektor ini berbeda dengan industri yang lain. Salah satunya adalah adanya regulasi yang sangat ketat, yang mengakibatkan penerapan teori agensi dalam akuntansi perbankan dapat berbeda dengan akuntansi untuk perusahaan non perbankan. Dengan adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan, yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) yang berperan sebagai prinsipal dan bank-bank yang terdapat di Indonesia sebagai agennya. BI bertugas untuk mengawasi kegiatan dan kinerja perbankan di Indonesia.

2.2.2 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi menjadi seperti yang mereka inginkan melalui pengelolaan faktor internal yang dimiliki perusahaan.

1. Definisi Sempit

Earning management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. *Earning management* dalam arti sempit didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya *earning*, (dalam Maya Indriastuti, 2012).

2. Definisi Luas

Earning management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit di mana manajer bertanggungjawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut. (dalam Ratnaningsih SY & Cholis Hidayati', 2012).

Manajemen laba diukur dengan menggunakan proksi *Discretionary accrual* (DA) yang diukur dengan menggunakan model Jones (1991). Davidson (1987) dalam Schipper (1989) yang dikutip dari Meutia (2004) menyatakan manajemen laba sebagai proses dilakukannya langkah-langkah yang disengaja dalam batasan prinsip-prinsip akuntansi untuk memperoleh tingkat pendapatan yang diinginkan. Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan pemegang saham dalam menilai prestasi ekonomi yang dicapai oleh perusahaan.

Manajemen laba merupakan fenomena yang sukar dihindari karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Manajemen laba timbul sebagai dampak dari penggunaan akuntansi sebagai salah satu alat komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan kelemahan inheren yang ada pada akuntansi yang menyebabkan adanya *judgement* (Setiawati, 2002).

2.2.3 Corporate Governance

Corporate Governance (CG) dianggap sebagai salah satu mekanisme untuk meminimalisir terjadinya manajemen laba yang dapat merugikan pihak lain. *Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002).

Kewajiban penerapan GCG dalam sektor perbankan tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Sulistyanto dan Wibisono (2003) mengemukakan bahwa *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini; pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat), dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, *stakeholder*.

Forum for Corporate Governance in Indonesia atau *FCGI* (2000) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, yaitu: "seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan." Disamping itu *FCGI* juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Pengaruh Corporate* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.

Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah :

1) Transparency (Keterbukaan Informasi)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Accountability (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independency* (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

1. *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.2.4 **Proporsi Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan. Fungsi dewan komisaris termasuk di dalamnya komisaris independen antara lain; melakukan pengawasan terhadap direksi dalam pencapaian tujuan perusahaan dan memberhentikan direksi untuk sementara bila diperlukan (Warsono dkk., 2009).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 mengatur proporsi dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan dan mengurangi tindakan manajemen laba [Klein (2006), Chtourou *et al.* (2001), dan Midiastuty dan Machfoedz (2003)].

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (2004), komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

2.2.5 Kepemilikan Manajerial

Boediono (2005), manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Hasil tersebut sesuai dengan Midiastuty dan Mahfoedz (2003) bahwa kepemilikan manajerial dengan manajemen laba berhubungan negatif. Penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen.

Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga (Jensen dan Meckling dalam Kawatu, 2009:408).

Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri.

2.2.6 Komite Audit

Dalam FCGI (2000) dinyatakan bahwa Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Komite Audit diketuai oleh Komisaris atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar dan

kemampuan akuntansi atau keuangan. Komite Audit sesuai dengan Kep.29/PM/2004, didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain komite audit juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal perusahaan.

Komite audit merupakan suatu komponen yang baru dalam perusahaan yang memiliki peranan sangat vital sebagai sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal perusahaan. Menurut Susiana dan Herawaty (2007), adapun yang menjadi tujuan dari adanya komite audit dalam suatu perusahaan adalah:

1. Memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan.
2. Memberikan kepastian bahwa pengendalian internal perusahaan telah memadai.
3. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti kemungkinan penyimpangan material dalam bidang keuangan dan implikasi hukumnya.

4. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor eksternal yang akan melakukan audit di perusahaan.

Sedangkan sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tertulis tugas dari komite audit adalah :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan

3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi

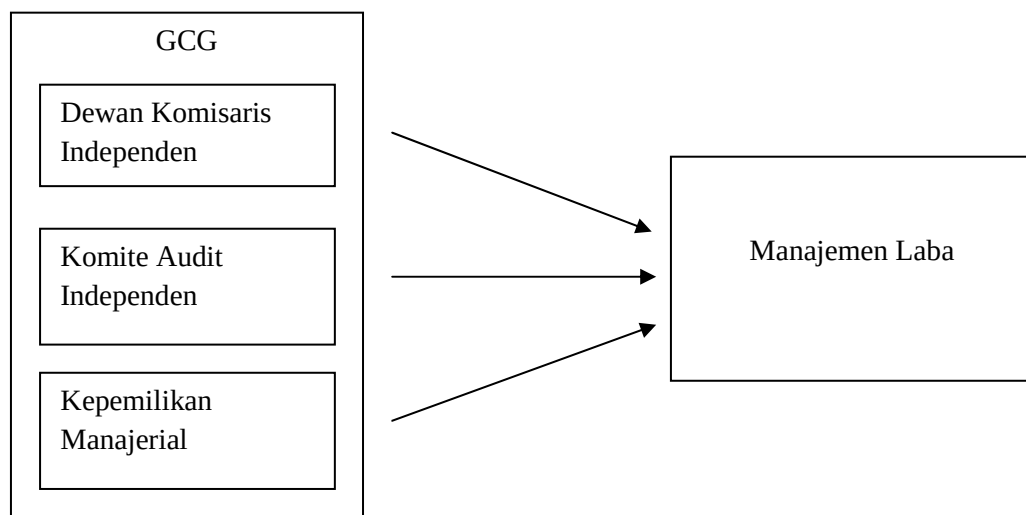
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.

6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, menggambarkan mengenai pengaruh *Mekanisme Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba pada perbankan yang terdaftar di BEI.

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H2 : Terdapat pengaruh Komite Audit Independen terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H3 : Terdapat pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.